

Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Masa dan Laporan Keuangan Bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Pakubuwono View

Erliana^{1*}, Debi Citra Dewi¹, Ghea B Sunanto¹

¹Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Juli 25, 2024

Approved Agustus 3, 2024

Keywords:

PPh Masa; Laporan Keuangan

ABSTRAK

Pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu darma perguruan tinggi menepati posisi yang strategis dalam menimba dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun wujud pembinaan tersebut yang dianggap paling realitis tidak lain, memberikan pembekalan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan yang dianggap berguna bagi khalayak masyarakat setempat. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis PPh yang beban pajaknya dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan lain. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meninjau kesesuaian antara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 oleh Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi yang hasil penelitiannya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan.

© 2024 JGEN

*Corresponding author email: 02723@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

PPh Masa (Pajak Penghasilan Masa) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dipungut oleh negara dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. PPh Masa dikenakan secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap triwulan, tergantung pada jenis dan ukuran badan usaha atau individu yang bersangkutan.

Laporan keuangan, di sisi lain, adalah dokumen atau rangkuman yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kondisi keuangan entitas tersebut.

Pengelolaan PPh Masa dalam konteks laporan keuangan menjadi penting karena melibatkan pencatatan dan pelaporan yang akurat terkait kewajiban pajak yang harus dibayar oleh entitas tersebut. Hal ini mencakup penghitungan PPh Masa yang tepat berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh serta pengungkapan informasi yang transparan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, pendahuluan mengenai PPh Masa dan laporan keuangan membahas tentang dua hal yang saling terkait: kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh entitas dan keterbukaan informasi mengenai keuangan entitas tersebut kepada publik dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pendampingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Masa dan laporan keuangan bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) seperti The Pakubuwono View melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

1. Pemahaman Terhadap Kewajiban PPh Masa

Penting untuk memahami jenis-jenis PPh Masa yang berlaku bagi PPPSRS seperti The Pakubuwono View, termasuk tarif pajak yang berlaku, jangka waktu pembayaran, serta aturan penghitungan dan pemotongan PPh yang relevan. Ini meliputi:

- a. PPh Pasal 21: PPh yang dipotong atas penghasilan dari upah, gaji, honorarium, atau imbalan lainnya kepada karyawan atau anggota PPPSRS.
- b. PPh Pasal 22: PPh atas penghasilan tertentu seperti bunga, royalti, dividen, dan lain-lain.
- c. PPh Pasal 23: PPh atas penghasilan dari bunga deposito, obligasi, sewa, atau jasa lainnya.

2. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat

Laporan keuangan bagi PPPSRS seperti The Pakubuwono View harus disusun secara akurat dan tepat waktu. Hal ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, penghitungan kewajiban pajak yang tepat, serta penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pencatatan Pendapatan dan Biaya: Memastikan semua pendapatan (seperti iuran anggota, sewa, dan lain-lain) dan biaya tercatat dengan benar.
- b. Pengungkapan Lengkap: Memastikan pengungkapan yang lengkap terhadap semua transaksi keuangan yang relevan, termasuk kewajiban pajak.
- c. Penghitungan Pajak: Menghitung PPh Masa yang tepat dan memastikan bahwa dana untuk pembayaran pajak telah disediakan.

3. Konsultasi dengan Ahli Pajak dan Akuntan

Penting untuk memiliki konsultan pajak atau akuntan yang berpengalaman dalam industri properti untuk memberikan panduan dan pendampingan. Mereka dapat membantu dalam mengoptimalkan struktur perpajakan, memberikan saran terkait pengurangan pajak yang legal, serta memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

4. Penerapan Sistem Informasi Keuangan yang Tepat

Menerapkan sistem informasi keuangan yang tepat dapat membantu dalam pencatatan transaksi yang akurat dan penyusunan laporan keuangan yang lebih efisien. Hal ini juga memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan pendampingan yang tepat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Masa dan penyusunan laporan keuangan yang akurat, PPPSRS seperti The Pakubuwono View dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM yang dilakukan tim dosen pada karyawan dan karyawan PPPSRS THE PAKUBUWONO VIEW yaitu dengan melakukan sosialisasi materi terkait dengan Pelaporan Pajak Orang Pribadi sekaligus tanya jawab seputar masalah pemahaman dan pelaporan yang dihadapi oleh karyawan dan karyawan PPPSRS THE PAKUBUWONO VIEW.

Metode yang akan dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melakukan kegiatan edukasi. Edukasi ini dilakukan agar karyawan dan karyawan memahami mengenai pelaporan PPh 21 orang pribadi serta pembayaran pajaknya dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaporan PPh 21 yang baik dan benar.

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka diharapkan para pelaku PPPSRS THE PAKUBUWONO VIEW lebih tertantang untuk mengembangkan jaringan wirausahanya dan mengenai pelaporan perpajakan di wilayah The Pakubuwono View.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kegiatan Masyarakat (PKM) bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) seperti The Pakubuwono View dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa metode atau langkah-langkah sebagai berikut:

Pentingnya pengetahuan mengenai pelaporan PPh Masa dan laporan keuangan sehingga diharapkan karyawan dapat melaporkan dengan baik dan benar. Melakukan simulasi mengenai perpajakan dengan pendampingan yang lebih insentif dalam PPh Masa dan laporan keuangan.

Banyaknya aplikasi laporan keuangan yang bisa di jadikan referensi dalam melaporkan keuangan bagi para pelaku PPPSRS The Pakubuwono View dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan PPPSRS The Pakubuwono View.



Gambar 1. Pemaparan Materi PkM



Gambar 2. Pelaksanaan PkM

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Para peserta bisa memahami dan mendapatkan ilmu mengenai perpajakan terutama tata cara pelaporan pajak orang pribadi PPh 21 sehingga dapat membuat laporan keuangan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerchia, R. W., Sifrid S. P., & Meily Y. B. (2015). Analisis Pemotongan Dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Apbn Atau Apbd Atas Gaji Dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Pada Dikpora Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, Vol. 3.
- Asnri. (2016). Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) 10% Untuk BPJS Dan Taspen. (Asnri.Com/Iuran-Wajib-Pegawai-Negeri-IWP-10-Untuk-Bpjs-Dan-Taspen).
- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan*.

- Dewi, M. S. dan Iestari, S. B. (2012). Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Bk, Persero). *Binus Business Review*, Vol. 3.
- Debora, W. N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Emba*, Vol. 1.
- Dian, P. PPh Pasal 21 : PPh 21 Pegawai Tidak Tetap. <https://www.Online-Pajak.com/Pph-21-Pegawai-Tidak-Tetap>.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S. & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. *Jurnal Emba*, Vol. 2.
- Hendra., Pangemanan, S. S. & Tangkuman, S. (2014). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Emba*, Vol. 2.
- Kondoy, V. C. I., Grace N. B., dan Inggriani, E. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pangalila, R. M., David S. Winston, P. (2016). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Perbaharuan PTKP Terbaru
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Pemotongan Biaya Jabatan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21
- Peraturan Peundang Undang Nomor : 101-PMK.010-2016 Mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jilid I. Jakarta: Salemba Empat.
- Resources, H. Menghitung Take Home Pay Dan Slip Gaji Semua Upah Minimum 2018 Dengan Benar. <https://sleekr.co/blog/menghitung-take-home-pay-danslip-gaji-semua-upah-minimum—2018-dengan-benar>.
- Runtuwarow, R. & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, Vol. 4.
- Selvie, L. S., Ventje, I. & Kalalo, M. Y. B. (2016). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. *Jurnal Emba*, Vol. 4.